

PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN DALAM MENJALANKAN PROGRAM PASAR MURAH

Fitri Faridatul Rahmah¹, Munawarah², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

e-mail: fitrifrdtlrhmh@gmail.com

ABSTRAK

Program pasar murah merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mengatasi permasalahan inflasi, mengurangi kasus stunting, dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat Balangan tersedia dengan harga yang lebih terjangkau. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pasar murah sangat berpengaruh terhadap kelangsungan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam menjalankan program pasar murah, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan cara mengatasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel diambil dengan metode purposive sampling yang melibatkan 11 orang responden. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis menggunakan teknik yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyeimbangan distribusi masih kurang optimal, ditandai dengan distribusi yang tidak merata dan tidak adanya mobilitas khusus. Namun, pada aspek kemampuan selektif, sudah berjalan dengan baik karena lokasi pasar murah dipilih dengan tepat. Aspek inovasi yang ditujukan untuk masyarakat yang melek teknologi telah baik, namun kurang berhasil menasar masyarakat yang tidak familiar dengan penggunaan handphone, media sosial, dan internet. Pada tingkat keabsahan, program ini sudah tergolong baik karena didukung laporan kegiatan yang transparan, anggaran yang jelas, dan evaluasi program yang terbuka untuk publik. Penggunaan platform digital dalam program ini menunjukkan kemajuan yang baik. Meski demikian, masalah distribusi yang tidak optimal menyebabkan pasokan bahan pokok terkadang kurang, sehingga kemampuan distribusi dalam program ini perlu ditingkatkan. Dalam hal panutan bagi masyarakat, program pasar murah telah sukses membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kinerja secara keseluruhan sudah baik, memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun peran sebagai pelaksana masih menghadapi kendala anggaran, waktu, dan keterbatasan distributor. Faktor yang mempengaruhi peran program ini adalah terbatasnya jumlah distributor yang berpartisipasi, serta keterbatasan anggaran dan waktu. Sebagai rekomendasi, disarankan kepada Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan untuk memperkuat koordinasi dengan distributor, guna memperbanyak partisipasi mereka dalam program pasar murah. Selain itu, peningkatan anggaran juga diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan optimal. Kepala Bidang Kemetrolagian dan Stabilitas Harga juga diharapkan lebih berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat. Pemahaman yang jelas tentang manfaat program pasar murah dan cara mengaksesnya juga harus disosialisasikan secara efektif kepada masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, Dinas, Perdagangan

ABSTRACT

The low-cost market program is one of the government's initiatives to overcome inflation problems, reduce stunting cases, and ensure that basic necessities for the Balangan community are available at more affordable prices. Community involvement in the implementation of the low-cost market program greatly influences the sustainability of the program. This study aims to explore the role of the Balangan Regency Industry and Trade Office in implementing the low-cost market program, as well as identifying inhibiting factors and how to overcome them. The approach used in this study is qualitative with a descriptive-qualitative type. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. Samples were taken using the purposive sampling method involving 11 respondents. After the data was collected, an analysis was carried out using techniques that included data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The results of the study showed that the effectiveness of distribution balancing was still less than optimal, marked by uneven distribution and the absence of special mobility. However, in terms of selective ability, it has been running well because the location of the low-cost market

was chosen appropriately. The innovation aspect aimed at technology-literate people has been good, but has been less successful in targeting people who are not familiar with the use of cellphones, social media, and the internet. At the level of legitimacy, this program is considered good because it is supported by transparent activity reports, a clear budget, and program evaluations that are open to the public. The use of digital platforms in this program shows good progress. However, the problem of suboptimal distribution causes the supply of basic necessities to sometimes be lacking, so that the distribution capacity in this program needs to be improved. In terms of role models for the community, the cheap market program has succeeded in helping the community obtain basic necessities at more affordable prices. Overall performance has been good, providing a positive impact on the community, although the role as an implementer still faces budget, time, and distributor limitations. Factors that influence the role of this program are the limited number of participating distributors, as well as budget and time limitations. As a recommendation, it is suggested to the Acting Head of the Balangan Regency Industry and Trade Service to strengthen coordination with distributors, in order to increase their participation in the cheap market program. In addition, an increase in the budget is also needed so that this program can run optimally. The Head of the Metrology and Price Stability Division is also expected to coordinate more with various parties, including local governments, traders, and the community. A clear understanding of the benefits of the cheap market program and how to access it must also be effectively socialized to the community.

Keywords: Role, Service, Trade

PENDAHULUAN

Pasar murah adalah salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menekan inflasi, mengurangi angka stunting, memperbaiki daya beli masyarakat, dan memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang terjangkau. Program ini sering kali diluncurkan sebagai respons terhadap kenaikan harga barang pokok yang dapat memberatkan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Peran penting dinas perindustrian dan perdagangan dalam pelaksanaan program ini sangatlah krusial. Keberhasilan pasar murah juga didukung oleh regulasi, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023.

Dinas perindustrian dan perdagangan berfungsi merancang, melaksanakan, serta mengawasi pasar murah secara efektif. Tugas mereka meliputi berbagai aspek penting, seperti perencanaan distribusi, koordinasi dengan penyedia barang, dan pengawasan operasional di lapangan. Sebagai lembaga pemerintah, dinas ini memastikan bahwa program pasar murah mampu mencapai tujuan utamanya, yakni memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat luas.

Di Kabupaten Balangan, program pasar murah yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan dua kali seminggu, sehingga ada total delapan kali pelaksanaan setiap bulan. Program ini dirancang untuk memenuhi target jangka pendek dalam periode tiga bulan (per triwulan). Dinas tersebut berupaya mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam setiap periode pelaksanaan.

Tidak hanya menysasar wilayah perkotaan, pasar murah ini juga menjangkau desa-desa terpencil di Kabupaten Balangan, termasuk lokasi-lokasi yang selama ini jarang menjadi perhatian. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga yang lebih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah-daerah tersebut. Asbit, SE, yang menjabat sebagai Analis Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, menyatakan bahwa tujuan utama dari pasar murah ini adalah membantu masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang lebih rendah.

Langkah-Langkah dalam Pelaksanaan Program Pasar Murah

1. Tahap Perencanaan dan Pengorganisasian

Dalam proses awal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu mengidentifikasi kebutuhan barang pokok yang akan disediakan dalam program pasar murah. Ini melibatkan kajian terhadap kebutuhan masyarakat setempat, analisis pasar untuk menentukan jenis barang prioritas, dan menetapkan harga yang sesuai agar program dapat memberikan manfaat nyata.

2. Koordinasi dan Kemitraan

Dinas bertugas untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak seperti

produsen, distributor, dan pedagang lokal. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi elemen penting untuk menjamin kelancaran ketersediaan barang bersubsidi. Langkah ini juga mencakup pengaturan logistik serta pendistribusian barang agar tidak terjadi ketimpangan antara lokasi yang satu dan lainnya.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pelaksanaan program pasar murah harus dipantau secara rutin untuk memastikan barang yang disediakan berkualitas, harga tetap terkendali, dan keluhan masyarakat dapat ditangani dengan baik. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Langkah pengawasan juga melibatkan penegakan aturan agar program berjalan sesuai prosedur.

4. Tantangan dan Solusi

Dalam praktiknya, berbagai tantangan seperti distribusi yang tidak merata, kurangnya alokasi anggaran, serta fluktuasi harga sering kali menjadi hambatan. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi adaptif, seperti implementasi sistem pemantauan yang lebih baik, pelatihan petugas di lapangan, serta peningkatan transparansi dalam proses pendistribusian barang.

Observasi Terhadap Permasalahan Program Pasar Murah

1. Jumlah Distributor yang Masih Terbatas

Masalah ini membutuhkan solusi berupa perbaikan sistem rantai pasok dan pengembangan kerja sama yang lebih kuat antara produsen dan distributor. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas distribusi agar keterbatasan jumlah distributor tidak lagi menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program pasar murah.

2. Keterbatasan Jangkauan Wilayah

Dalam setahun, pasar murah belum dapat menjangkau seluruh wilayah, terutama di Kabupaten Balangan yang terdiri dari 154 desa dan 3 kelurahan. Kendala ini muncul akibat keterbatasan anggaran dan alokasi waktu. Dengan cakupan wilayah yang luas, diperlukan strategi untuk memperluas jangkauan melalui pengaturan anggaran yang lebih efektif atau kerja sama lintas instansi guna memaksimalkan sumber daya yang ada.

3. Kendala Logistik di Daerah Terpencil

Ketersediaan armada untuk distribusi barang dan mobilitas petugas di wilayah terpencil sering kali tidak memadai. Minimnya akses transportasi yang memadai di lokasi tersebut memperlambat pengiriman barang dan pelaksanaan program. Solusinya adalah meningkatkan infrastruktur transportasi lokal dan menyediakan sarana mobilitas tambahan yang mampu mendukung kebutuhan distribusi secara optimal.

Secara umum, peran dapat diartikan sebagai kedudukan atau fungsi seseorang dalam menjalankan suatu aktivitas, kejadian, atau fenomena tertentu di masyarakat berdasarkan aturan atau norma yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto (2014:210-211), peran merupakan manifestasi dinamis dari status seseorang. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia sedang menjalankan perannya. Setiap individu memiliki berbagai peran yang muncul dari pola-pola kehidupan sosial yang dijalannya.

Peran menjadi faktor penting dalam menentukan kontribusi individu terhadap masyarakat serta peluang yang diterimanya dari masyarakat. Fungsi utama dari peran adalah memberikan batasan pada perilaku seseorang sehingga perilaku tersebut dapat diprediksi oleh orang lain. Dengan adanya peran, seseorang dapat menyesuaikan tindakannya sesuai dengan perilaku anggota kelompoknya. Peran juga selalu berhubungan dengan norma-norma yang berlaku, mencerminkan fungsi sosial, penyesuaian individu, dan proses dinamis dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap individu dalam suatu organisasi atau lembaga memiliki berbagai karakteristik unik yang memengaruhi cara mereka melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewajiban yang diberikan. Menurut Levinson dalam Soekanto (2014:211), konsep peran mencakup tiga elemen utama:

a) Peran sebagai Norma

Peran melibatkan serangkaian norma yang dikaitkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Norma-norma ini menjadi pedoman bagi individu untuk bertindak sesuai dengan

kedudukannya di lingkungan sosial.

b) Peran sebagai Konsep Tugas

Peran mencerminkan bagaimana individu dapat memberikan kontribusi dalam suatu komunitas atau organisasi melalui pelaksanaan tanggung jawab tertentu.

c) Peran sebagai Perilaku Sosial

Peran juga merujuk pada perilaku individu yang memiliki dampak penting dalam struktur sosial masyarakat.

Secara umum, peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang terkait dengan suatu jabatan tertentu. Kepribadian individu pun berperan dalam menentukan bagaimana tugas tersebut dijalankan. Dalam hierarki organisasi, baik pemimpin di tingkat atas, menengah, maupun bawah memiliki tanggung jawab yang sejajar dalam memainkan perannya masing-masing.

Dalam konteks pemerintahan, peran pemerintah memengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi, termasuk di bidang pendidikan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai pelaku utama penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah memegang kendali untuk mengatur dan menjalankan kebijakan dengan sistem wewenang yang dimiliki, sekaligus memainkan peran dominan dalam proses pembangunan nasional.

Menurut Siagian (2018:142-149), peran penting pemerintah mencakup lima aspek utama:

1. Stabilisator

Pemerintah bertindak sebagai penjaga stabilitas, dengan memastikan kondisi masyarakat dan lingkungan tetap kondusif untuk pertumbuhan.

2. Inovator

Pemerintah harus menjadi sumber inovasi, memunculkan gagasan-gagasan baru yang membawa dampak positif bagi masyarakat.

3. Modernisator

Pemerintah mendorong masyarakat menuju pola kehidupan yang lebih modern, sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Pelopor

Pemerintah bertindak sebagai panutan atau teladan bagi masyarakat, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan.

5. Pelaksana

Pemerintah juga berperan langsung sebagai pelaksana berbagai kebijakan atau program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu contoh nyata peran pemerintah adalah keterlibatan dalam program pasar murah. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka stunting sekaligus mengendalikan inflasi. Dalam hal ini, peran menunjukkan sejauh mana individu atau kelompok terlibat dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai kewajiban dan tanggung jawab yang diemban berdasarkan posisinya.

Pasar murah adalah sebuah upaya strategis yang dirancang sebagai perluasan dari operasi pasar untuk memastikan distribusi produk pangan berjalan secara efektif dan efisien di tingkat lokal. Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi harga, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong kesejahteraan sosial. Fokus utama program pasar murah adalah mengurangi permintaan pasar dengan harapan dapat menekan harga barang kebutuhan pokok secara keseluruhan. Dengan mengurangi tekanan permintaan, diharapkan harga-harga dapat lebih stabil dan terkendali (Suk, 2021).

Di Kabupaten Balangan, pemerintah menginisiasi program pasar murah sebagai langkah untuk menangani masalah inflasi dan mencegah stunting dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Tujuan utama dari program ini adalah meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya mereka

yang mengalami kesulitan akibat beberapa faktor seperti berikut:

1. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah lonjakan harga bahan pokok, terutama pada periode tertentu seperti musim panen rendah atau meningkatnya permintaan. Kenaikan harga ini memberikan tekanan signifikan bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Ketimpangan Ekonomi

Kesenjangan pendapatan di antara kelompok masyarakat juga menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan pasar murah. Banyak masyarakat kurang mampu kesulitan membeli kebutuhan pokok di harga pasar reguler karena daya beli yang terbatas.

3. Dampak Pasca Pandemi COVID-19

Pandemi telah menyebabkan penurunan pendapatan serta kehilangan pekerjaan di banyak kalangan masyarakat. Dampak ini membuat semakin banyak individu dan keluarga memerlukan dukungan untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

4. Peningkatan Inflasi

Lonjakan inflasi di wilayah Balangan menjadi alasan lain dalam pelaksanaan pasar murah. Inflasi sering kali menyebabkan kenaikan harga kebutuhan dasar yang sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memerlukan langkah mitigasi dari pemerintah (Sari et al., 2021).

Program pasar murah menyediakan berbagai bahan pokok penting seperti minyak goreng, gula, tepung, garam, dan lainnya dengan harga terjangkau. Untuk menjalankan program ini secara optimal, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek, seperti penentuan lokasi strategis, pengelolaan persediaan yang efisien, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan.

Program ini telah membantu masyarakat Balangan dalam mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Selain menjaga stabilitas harga, program ini juga berfungsi sebagai solusi bagi masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan pokok meskipun menghadapi tantangan ekonomi atau lonjakan harga di pasar reguler.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Artinya variabel yang diuji bersifat unik. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyatakan sesuatu yang menjadi pokok kajiannya secara rinci. Artinya penelitian dilakukan untuk memperjelas seluruh atau berbagai aspek dan tujuan penelitian. Data Primer yaitu semua data hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan. data sekunder, cara mengumpulkan informasi dengan melaksanakan studi kepustakaan dan menggali informasi terkait penelitian dari bahan kepustakaan seperti dokumen dan arsip. Sumber data yang dipakai yaitu snowball sampling. Menurut Sujewerni (2020: 72), metode pengambilan sampel dimulai dengan jumlah yang kecil dan lambat laun bertambah besar, seperti bola salju yang menggelinding.

PEMBAHASAN

1. Stabilisator

Salah satu fungsi utama pemerintah sebagai stabilisator adalah memastikan bahwa perubahan dalam masyarakat tidak berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengancam keutuhan negara, persatuan, dan kesatuan bangsa. Pemerintah harus memainkan peran ini secara efektif untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.

a. Efektivitas dalam Penyeimbangan

Efektivitas dalam penyeimbangan merujuk pada upaya optimalisasi pemanfaatan fasilitas, infrastruktur, serta sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang maksimal. Upaya ini termasuk penyeimbangan berbagai peran dalam pelaksanaan program oleh individu maupun organisasi.

Sebagai stabilisator, peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam melaksanakan program pasar murah masih memerlukan penguatan. Meskipun tujuan program ini adalah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi kurangnya koordinasi antar pihak terkait, terbatasnya dana, dan distribusi yang belum menyentuh semua wilayah secara merata. Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang masih perlu ditingkatkan membuat dampak program ini belum mencapai potensi maksimalnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori Sondang P. Siagian (2018:142-149), yang menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menciptakan perubahan harus mampu menghindari terjadinya konflik sosial. Pemerintah dapat mewujudkan hal ini melalui kemampuan selektif yang tinggi, pendidikan yang memadai, sosialisasi efektif, serta pendekatan yang bersifat persuasif.

b. Kemampuan Selektif

Kemampuan selektif mencakup keahlian untuk menentukan aspek-aspek mana yang perlu menjadi fokus dalam suatu inisiatif. Hal ini juga melibatkan kemampuan memilih prioritas yang paling sesuai dan menguntungkan masyarakat secara umum.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam menjalankan pasar murah menunjukkan implementasi kemampuan selektif yang cukup baik. Dinas ini mampu menentukan lokasi pasar murah yang mudah dijangkau masyarakat serta memastikan barang-barang yang dijual sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan cukup selektif dalam memilih lokasi pasar murah yang tepat sasaran serta dalam memastikan distribusi sembako yang adil kepada masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini membantu memastikan bahwa program benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Meski hasil yang dicapai cukup baik, tetap diperlukan peningkatan dalam diversifikasi produk kebutuhan pokok, seperti menambahkan barang-barang seperti beras dan kebutuhan esensial lainnya. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Balangan dapat lebih ditingkatkan.

Kesimpulan ini selaras dengan teori Sondang P. Siagian (2018:142-149), yang menekankan pentingnya kemampuan selektif sebagai salah satu cara pemerintah menjaga stabilitas dan mewujudkan perubahan tanpa menciptakan konflik atau ancaman terhadap persatuan bangsa.

2. Inovator

Inovasi merupakan wujud nyata dari kreativitas. Dalam konteks administrasi pembangunan, inovasi dapat dimaknai sebagai penciptaan ide, metode, sistem, atau cara berpikir yang baru. Sebagai inovator, pemerintah diharapkan menjadi sumber utama dalam menciptakan hal-hal baru sebagaimana dijelaskan di atas.

a. Menciptakan Hal-Hal Baru

Kemampuan menciptakan hal-hal baru melibatkan daya kreasi untuk menghasilkan gagasan maupun praktik nyata yang berbeda dari apa yang sudah ada. Hal ini mencerminkan kemampuan seseorang atau kelompok dalam mengembangkan pendekatan baru atau solusi inovatif terhadap suatu masalah, yang biasanya menghasilkan cara pemecahan yang segar, unik, dan lebih efektif dibandingkan sebelumnya.

Sebagai inovator, upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam menciptakan hal-hal baru dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal. Meski dinas tersebut mampu menawarkan inovasi bagi masyarakat modern yang akrab dengan media sosial, inovasi serupa belum menyentuh masyarakat yang kurang familier dengan teknologi, seperti lansia. Kendati demikian, mereka berusaha memperkenalkan pasar yang lebih efisien melalui berbagai inovasi, termasuk peningkatan distribusi barang, pengawasan mutu, dan penerapan teknologi dalam transaksi.

Inovasi yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini berkontribusi positif dalam memastikan kelancaran program pasar murah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dampak yang terlihat mencakup aksesibilitas yang lebih baik terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2018:142-149), peran pemerintah sebagai inovator seharusnya lebih menyeluruh. Dalam memainkan peran ini, pemerintah diharapkan memprioritaskan tiga aspek utama: inovasi dalam birokrasi pemerintahan, pengembangan inovasi konseptual, serta perbaikan sistem, prosedur, dan metode kerja.

b. Tingkat Keabsahan

Tingkat keabsahan atau legitimasi mengacu pada penerimaan publik terhadap kualitas dan kejelasan keputusan yang diambil. Hal ini didasarkan pada tingkat kepastian, transparansi, dan validitas dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks program pasar murah, tingkat keabsahan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan pengurangan beban ekonomi masyarakat. Hal ini didukung oleh anggaran yang transparan dan laporan kegiatan pasar murah yang jelas, menegaskan upaya pemerintah dalam menyediakan akses lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Hasil analisis menunjukkan kesesuaian dengan teori Sondang P. Siagian (2018:142-149), yang menekankan pentingnya legitimasi dalam mendukung peran pemerintah sebagai inovator. Untuk memainkan perannya secara efektif, pemerintah perlu mempertahankan tingkat legitimasi yang tinggi agar setiap kebijakan dan inovasi yang dilakukan dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3. Modernisator

Melalui upaya pembangunan, setiap negara bercita-cita untuk menjadi negara yang maju dan modern. Hal ini mencakup berbagai implikasi seperti memiliki ketahanan nasional yang kuat, kemandirian dalam berbagai aspek, dan kemampuan untuk dipandang sejajar oleh negara-negara lain. Ketahanan ini tidak hanya berarti mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menjalin kerja sama yang konstruktif dengan negara lain. Pengakuan yang setara di tingkat internasional juga menjadi bagian dari visi ini.

a. Menciptakan Kemajuan yang Modern

Kemajuan modern dapat dicapai dengan melakukan inovasi yang relevan sesuai perkembangan zaman. Setiap institusi perlu menghadirkan pembaruan yang modern agar tidak tertinggal dari perubahan teknologi dan sosial yang berlangsung pesat. Teknologi yang semakin maju juga harus dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas pembangunan.

Dalam konteks ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Misalnya, dengan memanfaatkan media sosial dan situs web resmi, dinas ini mampu mempromosikan program pasar murah secara modern, menjadikannya lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan lokal.

Temuan ini sesuai dengan teori Sondang P. Siagian (2018:142-149), yang menyatakan bahwa kemajuan modern dapat tercapai melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian manajerial yang unggul, pengelolaan sumber daya alam yang efektif, serta sistem pendidikan nasional yang mendorong terciptanya sumber daya manusia produktif. Faktor lainnya adalah stabilitas politik yang demokratis, visi masa depan yang jelas, kemampuan rakyat untuk mengambil keputusan rasional, kesiapan menghadapi risiko, serta penerimaan terhadap perubahan.

b. Kemampuan

Kemampuan merujuk pada kapasitas individu atau institusi dalam menjalankan tugas-tugas tertentu secara efektif. Penilaian terhadap kemampuan mencerminkan sejauh mana seseorang atau organisasi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan hasil yang optimal.

Dalam hal modernisasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan telah menunjukkan performa yang cukup baik. Pelaksanaan program pasar murah menjadi bukti nyata kemampuan dinas ini dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Koordinasi yang efektif, pengelolaan sumber daya yang baik, serta komunikasi yang terjalin dengan masyarakat dan pihak terkait telah memberikan kontribusi positif terhadap program ini.

Namun demikian, beberapa kendala masih perlu diatasi, seperti keterbatasan anggaran dan jangkauan wilayah yang terbatas. Selain itu, diperlukan diversifikasi produk sembako yang ditawarkan untuk menghindari keluhan dari masyarakat terkait kurangnya variasi bahan pokok. Dengan mengatasi tantangan ini, keberlanjutan program dapat lebih terjamin, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak kalangan.

Hasil penelitian ini belum sepenuhnya mencerminkan teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2018:142-149), yang menyebutkan bahwa pembangunan harus mampu menciptakan negara yang mandiri, tangguh, dan diakui setara oleh negara-negara lain. Untuk mencapai visi tersebut, kemampuan dalam berbagai aspek menjadi hal yang mutlak diperlukan.

4. Pelopor

Pemerintah memegang peran penting sebagai penggerak utama yang harus terlebih dahulu menerapkan inovasi di dalam lingkup pemerintahannya sendiri. Sebagai pelopor, pemerintah juga dituntut menjadi teladan (role model) bagi masyarakat luas. Hal ini berarti, aparatur pemerintah diharapkan mampu menunjukkan perilaku yang dapat diikuti dan memberikan inspirasi kepada warga negara.

a. Teladan bagi Masyarakat

Sebagai panutan, pemerintah dan lembaga terkait bertugas menunjukkan cara yang tepat untuk melakukan perubahan, sehingga menciptakan kemajuan yang lebih baik dibandingkan situasi sebelumnya. Ketika sebuah instansi atau lembaga mampu mencapai keberhasilan dalam suatu program, keberhasilan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam konteks pelaksanaan program pasar murah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan telah menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Dinas ini tidak hanya memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga menunjukkan transparansi dalam distribusi barang, ketersediaan produk, dan konsistensi pelaksanaan program. Dengan pendekatan ini, masyarakat merasakan dukungan nyata dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Penelitian ini mendukung teori Sondang P. Siagian (2018:142-149), yang menekankan bahwa aparatur pemerintah harus mampu menjadi role model bagi masyarakat. Dengan kepeloporan yang kuat, masyarakat akan lebih mudah mengadopsi pandangan baru, mengubah cara berpikir, serta memperbaiki cara kerja mereka, sehingga mempercepat jalannya pembangunan nasional.

b. Kinerja

Kinerja suatu organisasi mencerminkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kadang, aspek ini kurang diperhatikan hingga muncul masalah serius yang berdampak buruk pada reputasi organisasi dan memengaruhi hasil kerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Dalam hal pelaksanaan pasar murah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Balangan telah menunjukkan kinerja yang baik. Program ini berhasil memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi kalangan kurang mampu, untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih bersahabat. Hal ini dicapai melalui kerja sama yang efektif antara dinas, pedagang, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Namun, untuk meningkatkan manfaat dan dampak program secara keseluruhan, diperlukan evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus, terutama dalam aspek manajemen, distribusi, dan edukasi masyarakat. Dengan mengatasi kekurangan-kekurangan ini, program pasar murah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, sekaligus menjadi model yang diadopsi di wilayah lain.

Temuan ini sesuai dengan teori yang diutarakan oleh Sondang P. Siagian (2018:142-149), yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai pelopor harus menjadi teladan dalam berbagai hal positif, termasuk produktivitas kerja. Kepemimpinan yang berorientasi pada hasil ini memungkinkan masyarakat meneladani pemerintah dan mengikuti arah perubahan ke arah yang lebih baik.

5. Pelaksana Sendiri

Peran pemerintah dalam melaksanakan program dan kebijakan selalu terkait dengan kemampuan pemerintah itu sendiri dalam menjalankan tugas yang diamanatkan. Meski diharapkan agar masyarakat semakin maju dan dapat berperan lebih banyak secara mandiri, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan menyelesaikan berbagai kegiatan yang penting.

a. Berperan Sebagai Pelaksana

Sebagai pelaksana, pemerintah harus mampu memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik melalui pelaksanaan yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai target-target pembangunan yang telah direncanakan.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam menjalankan program pasar murah menunjukkan bahwa meski terdapat beberapa keberhasilan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dalam hal distribusi barang, anggaran yang terbatas, serta waktu yang terbatas menjadi tantangan besar bagi kelancaran program. Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus diperlukan, terutama dalam hal manajemen, distribusi barang, dan penyuluhan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan di masa yang akan datang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki peran penting sebagai pelaksana, tantangan dalam mencapai efisiensi masih ada. Hal ini selaras dengan pandangan Sondang P. Siagian (2018:142-149), yang menjelaskan bahwa pembangunan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Banyak kegiatan yang, karena alasan tertentu seperti keselamatan negara atau keterbatasan sumber daya, harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah dan tidak dapat diserahkan begitu saja kepada pihak swasta.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Balangan Dalam Menjalankan Program Pasar Murah

1. Faktor Penghambat

- a. Masih terbatasnya distributor
- b. Belum bisa mengadakan pasar murah keseluruh desa

2. Faktor Pendorong

- a. Membuat kemitraan dengan distributor lokal dan BUMD
- b. Adanya target yang harus di kejar dan jumlah SDM yang cukup

SIMPULAN

Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan program pasar murah dapat dikatakan cukup baik. Program ini dievaluasi berdasarkan lima aspek utama. Dalam variabel Stabilisator, pada indikator efektivitas dalam penyeimbangan, peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam menjalankan program pasar murah

menunjukkan kinerja yang kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang mengakibatkan distribusi barang yang tidak merata serta tantangan mobilitas ke wilayah-wilayah dengan akses jalan yang sulit dijangkau, sehingga program pasar murah kurang efektif di beberapa area. Namun, pada indikator kemampuan selektif, penilaian menunjukkan hasil yang baik, karena pemilihan lokasi pasar murah yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat sudah berjalan dengan tepat. Pada variabel Inovator, indikator dalam menciptakan hal-hal baru, menunjukkan kinerja yang kurang baik. Pembayaran menggunakan Qrizz dan penggunaan kanal YouTube hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan teknologi tinggi, sementara masyarakat di daerah pelosok desa yang tidak memiliki jaringan internet masih tidak terjangkau. Namun, pada indikator tingkat keabsahan, pelaksanaan program pasar murah menunjukkan kinerja yang baik, dengan adanya laporan kegiatan yang jelas, anggaran yang transparan, serta evaluasi yang dapat diakses publik. Dalam variabel Modernisator, pada indikator membuat kemajuan yang modern, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan telah menggunakan platform digital dengan cukup baik, seperti melalui pembagian brosur online dan pemanfaatan media sosial untuk promosi pasar murah. Meski demikian, indikator kemampuan masih kurang optimal karena keterbatasan jumlah distributor yang berpartisipasi dalam program ini, menyebabkan beberapa keluhan dari masyarakat terkait kekurangan pasokan bahan pokok yang dijual. Pada variabel Pelopor, indikator panutan bagi masyarakat menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan telah dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Mereka berusaha mengorganisir dan mengelola program pasar murah dengan efisien. Selain itu, indikator kinerja juga baik, dengan adanya dampak positif terhadap masyarakat Kabupaten Balangan, khususnya dalam hal ketersediaan bahan pokok yang lebih terjangkau. Pada variabel Pelaksana Sendiri, indikator peran sebagai pelaksana menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program pasar murah. Kendala anggaran, keterbatasan waktu, dan masalah dengan distribusi mempengaruhi kelancaran pelaksanaan, terutama terkait dengan kurangnya variasi bahan pokok yang dijual. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam menjalankan program pasar murah. Faktor penghambat utama adalah terbatasnya jumlah distributor yang terlibat dan kurangnya kemampuan untuk mengadakan pasar murah di seluruh desa di Kabupaten Balangan akibat keterbatasan anggaran dan waktu. Sementara itu, faktor pendorong yang memperkuat pelaksanaan program ini antara lain adalah kemitraan dengan distributor lokal BUMD dan adanya target yang harus dicapai, serta ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinda Permatasari, (2019). *Peran Dinas Perindustriandan Perdagangan Dalam Pengelolaan Program Pasar murah di Kota Malang*. eJournal Ilmu Administrasi Publik.
- Siagian, S. P. (2018). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, Dan Strateginya), Edisi Kedua*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono, D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Wibowo, (2020). *Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pasar Murah di Kota Yogyakarta*. eJournal Manajemen Pembangunan Daerah.